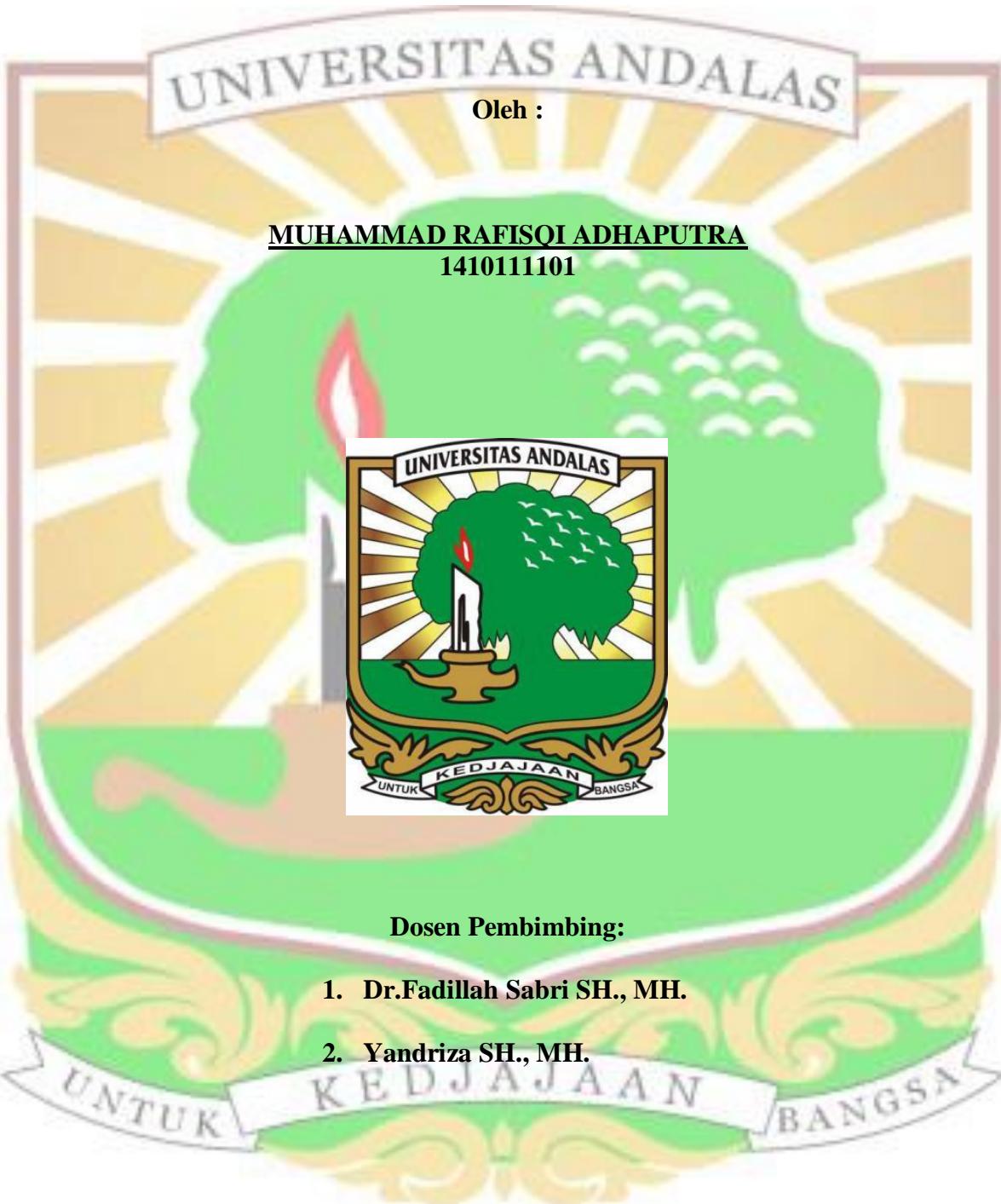


“Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Kota Pariaman”



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS IIB KOTA PARIAMAN**

M Rafisqi Adhapatra, Fadillah Sabri, Yandrizza

ABSTRAK

Remisi merupakan suatu bagian dari fasilitas pembinaan, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan. Setiap warga binaan yang menjalani pidana dan kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999.. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman 2) Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman dan 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis,. Penulisan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan metode editing, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, berdasarkan data yang telah diperoleh, dalam pelaksanaan pemberian hak remisi kepada warga binaan LAPAS Kota Pariaman, pemberian hak remisi selama dua tahun terakhir sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan, seperti dirasakan kurangnya kerjasama antara pihak Lapas dengan lembaga terkait dalam pemberian hak remisi. Faktor perilaku buruk narapidana yang masih melanggar peraturan didalam LAPAS, serta kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya administratif dalam struktur organisasi Lapas, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pemberian hak remisi kepada warga binaan. Upaya yang dilaksanakan dalam memperbaiki kendala yang terjadi antara lain, menjalankan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional pengawasan pemberian remisi. Harus adanya pemberdayaan setiap lembaga dan institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana. Diupayakannya peningkatan dari kompetensi sumber daya manusia agar dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya.serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, melalui pembinaan terstruktur dan berkesinambungan.

REMITION ALLOCATION FOR PRISONER IN CLASS IIB PRISON OF PARIAMAN CITY

M Rafisqi Adhapatra, Fadillah Sabri, Yandrizza

ABSTRACT

Remission is a part of the coaching facility, where the nature of the coaching is in addition to providing sanctions, it also provides rewards as one of the coaching efforts. Every fostered citizen undergoing a sentence of imprisonment and confinement can be given remission if he or she behaves well while undergoing a crime in accordance with Article 1 of the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 174 of 1999 .. As for the formulation of the problem in this thesis, namely 1) How the implementation of granting remission rights for fostered residents in Class IIB Prison in Pariaman City 2) What are the obstacles in the implementation of granting remission rights for fostered residents in Class IIB Prison in Pariaman City and 3) How to overcome obstacles in the implementation of granting remission rights for fostered residents in Class IIB Prison in Pariaman City. This thesis writing uses the sociological juridical method ., Writing is analytical descriptive. Data collection techniques are document studies and interviews. The data processing method in this writing uses the editing method, while the data analysis uses qualitative analysis. The results of the research that the author has done, based on the data that has been obtained, in the implementation of the granting of remission rights to residents of the Pariaman City Prison, the granting of remission rights for the past two years has been going quite well, but there are still some obstacles that occur in the field, such as perceived lack of cooperation between the Lapas and related institutions in granting remission rights. Factors of bad behavior of prisoners who still violate regulations in the prison, as well as the lack of quantity and quality of administrative resources in the organizational structure of Lapas, so that it causes the process of granting remission rights to inmates. Efforts carried out in repairing the obstacles that occur include, to the maximum extent possible the laws and regulations and the implementing regulations for operational provisions for supervision of remission. There must be empowerment of each institution and institutions involved in supervising remissions for prisoners. Efforts should be made to improve the competency of human resources so that they can work to the maximum extent possible in carrying out their duties. As well as optimizing the implementation of coaching in Penitentiaries, through structured and continuous guidance.